

Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui Environmental Support Programme Phase III (ESP3)

Kharisma Anissa Dewi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: kharismaanissadewi@gmail.com



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
VOL. 2, NO. 1 (2021)

Page: 51 – 61

Recommended Citation:

Dewi, K. (2021). Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui Environmental Support Programme Phase III (ESP3). *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 2(1), 51-61.

doi:<https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.23042>

Available at:

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/23042>



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Abstract. Based on the Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark is the most climate-friendly country in the world. As a country that cares so much about the environment, Denmark provides a lot of assistance or support to other countries for environmental preservation programs, including Indonesia. The Danish Environmental Support Program (ESP) has spent a lot of money on Indonesia. However, with insignificant progress, Denmark still continued to provide assistance as far as 3 phases. The first phase was in 2005-2007, the second phase was in 2008-2012 and the last was the third phase in 2013-2018. This raises the question "What are Denmark's national interest behind providing assistance under ESP3?". The methodology of this research is descriptive analysis using the theory of Neorealism and the concept of the National Interest. This article concludes that Denmark has 3 national interests in this regard. Namely ideological interests, economic interests and world order interests.

Keywords: Environmental Support Program Phase III (ESP3), National Interest, Denmark, Indonesia.

Abstrak. Berdasarkan *Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015* Denmark merupakan Negara paling *climate-friendly* di dunia. Sebagai Negara yang begitu peduli akan lingkungan Denmark banyak memberikan bantuan atau *support* kepada Negara lain untuk program penjagaan lingkungan, termasuk Indonesia. Pada *Environmental Support Programme (ESP)* Denmark mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk Indonesia. Namun dengan kemajuan yang tidak signifikan Denmark masih tetap melanjutkan pemberian bantuan ini hingga 3 fase. Fase pertama tahun 2005-2007, fase kedua tahun 2008-2012 dan terakhir fase ketiga tahun 2013-2018. Hal ini menimbulkan pertanyaan "Apa sebenarnya kepentingan nasional Denmark dibalik pemberian bantuan dalam ESP3?". Metodologi penelitian kali ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teori Neorealisme dan Konsep Kepentingan Nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa ada 3 kepentingan nasional Denmark dalam hal ini. Yaitu kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi dan kepentingan tata internasional.

Kata Kunci: Environmental Support Programme Phase III (ESP3), Kepentingan Nasional, Denmark, Indonesia.

PENDAHULUAN

Isu lingkungan berkaitan erat dengan keamanan. Dalam menanggulangi permasalahan lingkungan ini akan dibutuhkan adanya kekompakan dan komitmen yang melibatkan lebih dari satu Negara. Hal ini dibuktikan dari banyaknya upaya yang dilakukan dunia internasional untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya perubahan iklim dan *global warming*.

Denmark merupakan salah satu Negara yang sangat mengedepankan lingkungan. Bahkan berdasarkan *Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015* Denmark merupakan Negara paling *climate-friendly* di dunia (*The Climate Change Performance Index Result*, 2015:24). Sebagai Negara yang begitu peduli akan lingkungan Denmark banyak memberikan bantuan atau *support* kepada Negara lain untuk program penjagaan lingkungan.

Denmark dan Indonesia sendiri sudah memulai hubungan diplomatiknya sejak tahun 1950 dan mulai semakin meningkat mulai tahun 1970 ketika Indonesia mengalami reformasi. Kedua Negara menjalin hubungan bilateral dalam berbagai bidang, yaitu: Ekonomi (salah satunya adalah Pembangunan), Perdagangan, Maritim (yang didalamnya termasuk pertahanan), Pertanian, Pariwisata dan Energi. Denmark dan Indonesia juga terus masih berusaha untuk mempererat hubungan bilateral kedua Negara hingga sekarang. Salah satunya dengan ditandatangani nya deklarasi bersama di tahun 2015 tentang kemitraan inovatif menuju abad 21. Deklarasi ini ditandatangani untuk menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk mengupayakan penguatan kerja sama dalam berbagai bidang. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut yang membuat adanya kerjasama dalam bidang pembangunan, politik, kesehatan, ekonomi dan perdagangan, yang terjalin sampai sekarang. Selain itu rencana pelaksanaan aksi kemitraan tahun 2017-2020 juga ditandatangani pada 2017 lalu.

Indonesia di sisi lain, adalah Negara berkembang yang berusaha untuk memperbaiki dan memajukan sektor lingkungannya. Sebagai Negara dengan populasi terbanyak ke 4 di dunia tentunya Indonesia membutuhkan banyak bahan bakar untuk menghasilkan energy. Hingga saat ini bahan bakar energy di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil (Wiratmini, 2019). Sedangkan seperti yang sudah diketahui proses terbentuknya bahan bakar fosil memakan waktu yang sangat lama. Hal ini membuat Indonesia harus mampu menemukan alternative bahan bakar lain, seperti energy terbarukan.

Pada tahun 2015 Indonesia menargetkan emisi gas rumah kaca Indonesia bisa dikurangi

hingga 29% pada tahun 2030 (Saturi dan Nygraha, 2015). Namun hingga tahun 2018 belum ada penurunan yang signifikan dari masing-masing sektor dan justru beberapa kali mengalami kenaikan, keterangan ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari buku Statistik tahun 2018 Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim (Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, 2018).

Untuk menjadi Negara yang lebih ramah lingkungan Indonesia perlu mendapatkan bantuan dari Negara lain. Denmark adalah salah satu Negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia melalui beberapa program lingkungan. Program lingkungan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2005 sebagai bagian dari *Energy and Environment Cooperation* (EEC) (MoFA Denmark, 2016:24).

Energi bersih dan terbarukan adalah sebuah hal yang penting bagi Denmark dan maka dari itu Denmark ingin mendorong Negara lain untuk ikut peduli dan menghasilkan energy bersih terbarukan. Walaupun hasil dari program di Indonesia kurang signifikan Program bantuan kerjasama lingkungan dilanjutkan oleh Denmark dalam *Environment Support Programme (ESP) Phase 2* di tahun 2008-2012 dan ESP 3 di tahun 2013-2017 (MoFA Denmark, 2016:24).

Bantuan yang diberikan Denmark kepada Indonesia tidaklah kecil. Pada *Environmental Support Programme Sector* (ESPS) Denmark mengeluarkan USD 13,256,758.00 (DANIDA ESPS) kemudian pada ESP2 Denmark kembali memberikan dana sebesar USD 40,107,827.00 (DANIDA ESP2) dan pada ESP3 sebesar USD 15,432,834.00 (DANIDA ESP3). Nominal itu tidaklah sedikit dan dengan kemajuan yang tidak signifikan di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mempertanyakan apa alasan Denmark memberikan bantuan lingkungan sebanyak itu kepada Indonesia. Sepertinya selain faktor ingin membuat Indonesia mampu menghasilkan energi terbarukan dan memajukan sektor lingkungannya, Denmark memiliki tujuan lain dalam pemberian bantuan terhadap Indonesia.

Teori Neorealisme

Neorealisme merupakan teori yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz. Waltz memiliki banyak karya dalam bidang Hubungan Internasional, salah satu yang paling sering diperbincangkan adalah bukunya yang berjudul "*Theory of International Politics*" (1979). Teori ini merupakan teori turunan dari Realisme, sehingga beberapa asumsi dasarnya serupa. Namun berbeda dengan Realisme klasik, Neo-realisme memandang disamping negara sebagai aktor utama tetap ada aktor lain dalam hubungan internasional. Maka dari

itu bagi Neorealist tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kerjasama baik antar negara ataupun negara dengan sebuah institusi.

Selain itu bagi Waltz, hal utama yang paling penting bagi sebuah Negara adalah *power*. Definisi *power* menurut Waltz bukan hanya sebatas kemampuan militer namun juga termasuk ukuran populasi dan wilayah, kekayaan sumber daya, kemampuan ekonomi, stabilitas politik dan kompetensi Negara tersebut secara keseluruhan (Pashakhanlou, 2009:2).

Waltz dalam bukunya menuliskan "*The interaction of tribal units are affected by tribal structure, how decisions of firm are influenced by their market, and how people's behavior is molded by the offices they hold*" (Waltz, 1979:81). Jika Realisme klasik menempatkan akar konflik dan perang internasional pada sifat manusia yang tidak sempurna, Neorealis berpendapat bahwa penyebab utama konflik justru ditemukan dalam sistem internasional yang anarkis. Sehingga untuk mendapatkan *power* sebuah negara perlu memiliki kapabilitas yang lebih dari negara lainnya.

Neorealist percaya bahwa *power* sangat penting bagi suatu negara. Definisi *power* bagi neorealist bukan hanya sekedar kekuatan militer, namun termasuk kekuatan ekonomi, politik hingga sosial budaya. Semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara, maka negara tersebut akan memiliki pengaruh besar dalam sistem internasional. Walaupun sistem internasional bersifat anarki, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara yang kuat jelas akan mempunyai pengaruh (*influence*) pada negara-negara lain. Semakin kuat negaranya, negara lain akan lebih mudah untuk percaya dan bekerja sama dengan negara tersebut. Maka dari itu, pengaruh suatu negara dalam tatanan internasional sangatlah penting bagi *neorealist*.

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional mencakup banyak sektor termasuk politik, ekonomi, militer hingga sosial budaya. Donald E. Nuechterlein dalam jurnalnya yang berjudul "*National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*" mencoba membagi kepentingan nasional kedalam 4 hal, yaitu (Nuechterlein, 1976):

1. **Pertahanan (*Defense Interest*):** kepentingan untuk mendapatkan pertahanan bagi sebuah Negara dan penduduknya dari ancaman yang datang dari luar khususnya serangan dari Negara lain ataupun serangan yang sengaja dilakukan untuk menyerang system pemerintahannya.

2. **Ekonomi (*Economic Interest*):** kepentingan untuk meningkatkan ekonomi Negara dengan menjalin hubungan dengan Negara lain.
3. **Tata Internasional (*World Order Interest*):** kepentingan untuk menjaga sistem politik dan ekonomi dalam dunia internasional agar Negara dapat merasa aman dan agar perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik.
4. **Ideologi (*Ideological Interest*):** kepentingan untuk melindungi ideology Negara tersebut.

Nuechterlein (1976:248) juga menambahkan penting untuk dianalisa lebih lanjut terkait cara pandang suatu Negara akan isu-isu internasional tertentu karena hal tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari seorang pemimpin Negara dan pastinya kepentingan nasionalnya. Tercapainya kepentingan nasional suatu Negara akan membuat negara tersebut akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan dan negara akan bisa mempertahankan keutuhannya (Robert dan Georg, 2005:88).

Menurut Neuchterlein (1976) kepentingan nasional suatu negara memiliki intensitasnya masing-masing. Dimana intensitas ini akan menentukan seberapa penting suatu isu bagi sebuah negara. 4 macam intensitas tersebut adalah:

1. ***Survival Issues*:** Ketika isu tersebut akan mengancam dan membahayakan keberadaan suatu negara. Merupakan bagian dari serangan militer.
2. ***Vital Issues*:** Ketika suatu isu akan menyebabkan kerugian seius terhadap suatu negara kecuali dilakukan tindakan tegas yang di dalamnya termasuk kekuatan militer.
3. ***Major Issues*:** Di mana kesejahteraan politik, ekonomi dan ideology negara dapat terpengaruh (dirugikan) oleh peristiwa yang terjadi di lingkungan internasional yang maka itu memerlukan tindakan korektif untuk mencegahnya menjadi ancaman serius.
4. ***Peripheral Issues*:** Di mana kesejahteraan negara tidak terpengaruh secara negatif oleh peristiwa atau tren di luar negeri, tetapi di mana kepentingan warga negara dan perusahaan yang beroperasi di negara lain mungkin terancam.

Definisi kepentingan nasional Nuechterlein cocok dengan definisi *power* menurut Neorealist. Maka dari itu penulis merasa konsep ini dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini. *Power*

yang dianggap sangat penting oleh neorealist akan kemudian coba diwujudkan melalui kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional dapat diperoleh melalui salah satunya kerjasama.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap suatu fenomena maupun fakta. Pendekatan kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif baik berupa gambar, kata, maupun kejadian (Yusuf, 2014:43). Penelitian tipe ini sejak awal ingin mengungkapkan data secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data- data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal, artikel online, dan berita- berita dari media massa yang terkait dengan bahasan penelitian ini.

Hubungan Diplomatik Denmark dan Indonesia

Denmark dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik sejak lama, lebih tepatnya dimulai sejak tahun 1950. Hubungan kedua Negara semakin erat dengan dukungan Denmark dalam proses demokratisasi Indonesia. Sejak tahun 1997 ketika reformasi terjadi di Indonesia, hubungan dengan Denmark menjadi semakin erat. Denmark menyambut hangat perubahan di Indonesia setelah krisis pada tahun 1998 dan menganggap bahwa demokrasi di Indonesia telah berkembang pesat. Ia juga menganggap Indonesia sebagai negara penting di ASEAN dan sebagai "negara yang sangat penting" di dunia Islam.

Denmark dan Indonesia melakukan kerjasama dalam banyak bidang, salah satunya adalah bidang maritim atau kelautan. Salah satu masalah yang saat ini menjadi perbincangan hangat adalah sampah laut atau *Marine Debris*. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya gerakan-gerakan untuk mengurangi penggunaan plastic dengan tujuan mengurangi sampah plastic yang akan berakhir di laut. Denmark dalam hal ini tentu tidak tinggal diam khususnya melihat kondisi sampah laut di Indonesia yang termasuk parah. Denmark memberikan dana sebesar 1,5 juta USD

untuk mengurangi sampah plastik di perairan Indonesia (Ocean Conference Website). Denmark mendukung pengembangan dan implementasi Rencana terkait Sampah Laut Nasional Indonesia yang diluncurkan pada Juni 2017. Rencana ini membahas pentingnya kontrol dan kesadaran penanganan serta pengurangan limbah plastik di wilayah pesisir dan dengan ini mengurangi pembuangan plastik ke lautan hingga 80%. Denmark berharap dapat mengurangi tantangan yang ditimbulkan oleh sampah laut terhadap industri perikanan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Selain kerjasama Maritim, Denmark dan Indonesia juga melaksanakan kerjasama dalam bidang ekonomi. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Denmark didirikan berdasarkan perjanjian perdagangan yang ditandatangani di Kopenhagen pada 9 Desember 1952. Tahun demi tahun, volume perdagangan antara kedua negara terus meningkat. Ekspor Indonesia ke Denmark didominasi oleh produk alas kaki, minyak kelapa sawit, produk hutan, tembakau dan produk baja. Sementara impor Indonesia dari Denmark termasuk produk farmasi, bahan kimia, mesin, peralatan listrik, daging, produk susu dan ikan. Di sektor investasi, data investasi asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa pada 2009, Denmark menempati peringkat ke-30 sebagai investor terbesar di Indonesia.

Pada tahun 2015 Indonesia dan Denmark sempat menandatangani deklarasi bersama dengan tema "*An Innovative Partnership for The 21st Century*". Dalam deklarasi bersama atau *Joint Declaration* tersebut, terdapat 13 poin yang disetujui oleh kedua negara. Pada poin nomor 8 tertulis "*To strengthen economic ties by encouraging and promoting bilateral trade and investments in priority sectors to support continued economic growth and job creation for both countries*" (KBRICPH, 2015). Sehingga di tahun berikutnya, 2016, pemerintah Denmark dan Pemerintah Indonesia mewujudkan poin tersebut dengan menandatangani MoU terkait investasi Denmark di Indonesia. Denmark menginvestasikan sebesar Rp 2 Triliun untuk industri perkebunan jagung dan gula Indonesia serta industri peternakan (Pushkin et al. 2016). Kerjasama ini juga melibatkan transfer teknologi pertanian Denmark, sementara bagian dari kesepakatan Indonesia adalah menyediakan dua juta hektar lahan.

Presiden Joko Widodo sudah menyetujui persiapan dua juta hektar lahan di Sulawesi Tenggara, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur untuk kemitraan dengan Denmark. Satu juta hektar lahan akan digunakan untuk ternak hidup, sedangkan satu juta hektar

lahan sisanya akan dibagi rata untuk pengembangan perkebunan jagung dan tebu.

Selain kerjasama ekonomi, Denmark dan Indonesia juga bekerjasama dalam bidang Pembangunan. Denmark sesuai dengan undang-undang keuangannya mempunyai kebijakan untuk memberikan bantuan pembangunan bagi negara-negara berkembang dimana Indonesia merupakan salah satunya. Bantuan pembangunan Denmark khususnya bantuan pembangunan fisik dewasa ini lebih difokuskan pada negara-negara Afrika. Sementara di Asia termasuk Indonesia yang dinilai situasi perekonomiannya telah semakin baik, bantuan pembangunan tersebut lebih berorientasi pada kerjasama pembangunan khususnya di sektor-sektor yang terkait dengan kepentingan nasional negara penerima dan Denmark (KBRICPH).

Denmark melalui DANIDA mengadakan kerja sama dengan Indonesia di beberapa sektor, yang salah satunya adalah program dukungan lingkungan. Program ini mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan manajemen lingkungan dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Denmark yang dilaksanakan melalui DANIDA adalah *Strategic Sector Cooperation* (SSC) yang di dalamnya terdapat kerjasama sektor energi yang sudah berlangsung sejak 2016. Kerjasama ini berlaku baik pada tingkat teknis maupun kelembagaan dan nantinya hasil dari SSC akan menjadi pendukung dalam memajukan perencanaan energy yang lebih baik. SSC memiliki 3 bidang inti yaitu, 1) *Energy Modelling* 2) *Integration of Renewable Energy* (RE) dan 3) *Energy Efficiency* (EE) (MoFA, 2016).

Salah satu hasil nyata dari kerjasama ini adalah dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). *Indo Wind Power*, anak perusahaan *Asia Green Capital Partner*, menandatangani perjanjian rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) dengan *Vestas Wind Systems*, produsen turbin angin yang berbasis di Denmark untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. PLTB ini dinamakan PLTB Tolo I Jeneponto yang dibangun sejak 2016 dan berhasil beroperasi komersial pada 14 Mei 2019 (Humas EBTKE, 2019). PLTB Tolo yang dikelola oleh pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) ini memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mencapai sekitar 40%. Dengan tinggi 133 meter (m) dan panjang baling-baling 63 m, 20 turbin yang terpasang masing-masing mampu mengalirkan listrik sebesar 3,6 MW, sehingga kapasitas totalnya mencapai 72 MW. Kehadiran PLTB ini mampu melistriki setara 300.000 rumah tangga pelanggan 900 VA.

SSC hanya merupakan salah satu bentuk kerjasama pembangunan antara Denmark dan Indonesia, disamping itu ada kerjasama pembangunan lainnya dalam bidang lingkungan yang dilakukan melalui *Environmental Sector Support Programme* (ESPS) yang kemudian berubah nama menjadi *Environmental Support Programme* (ESP) pada periode selanjutnya.

Environmental Support Programme Phase I (ESP1)

Setelah penerbitan *Danish Environmental Strategy for Environmental Assistance to Developing Countries 2004-2008*, Indonesia dan Denmark sepakat untuk memulai *Environmental Sector Support Programme* (ESPS) pada tahun 2005. Fase pertama *Environment Support Programme* (ESP), yang dilaksanakan dari 2006-2007, berpusat di sekitar kerusakan lingkungan parah yang disebabkan oleh Tsunami 2004 dan reorganisasi berikutnya dari prioritas pengelolaan lingkungan Indonesia (*Website ESP3*). Pencapaian paling penting dari ESP1 adalah pemulihan lembaga lingkungan utama dan menjaga kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah yang terkena dampak di Indonesia. ESP1 memiliki anggaran 90 juta DKK.

Area fokus pertama pada ESP1 adalah untuk rekonstruksi Aceh yang pada saat itu mengalami banyak kerusakan setelah bencana tsunami. Dari anggaran total 90 juta DKK, sebanyak 60 juta DKK telah diberikan sebagai kontribusi baru kepada *Multidonor Trust Fund* untuk rekonstruksi di Aceh (DANIDA OPENAID). Dana tersebut berkontribusi untuk mendanai proyek-proyek berdasarkan rencana rekonstruksi pemerintah Indonesia, yang memprioritaskan bidang-bidang yang mempromosikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan zona pesisir, penanaman bakau, dan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan.

Environmental Support Programme Phase II (ESP2)

Fase kedua dari *Environmental Support Programme*, ESP2, berjalan dari tahun 2008-2012 dengan anggaran 220 juta DKK untuk tiga komponen yang masing-masing berfokus pada pengelolaan sumber daya lingkungan, energi dan sumber daya berbasis masyarakat (SDM). ESP2 mengadopsi pendekatan kolaboratif yang dibentuk di bawah ESP1, di mana kelompok kerja bersama antara Lembaga Sektor Publik utama dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih strategis untuk penerapan alat lingkungan. Terdapat 3 Komponen utama dalam fase kedua ini.

Komponen 1, Dukungan untuk Lembaga Sektor Publik. Dengan alokasi dana sebesar 40 juta DKK, akan ditujukan pada peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan lintas sektor dan desentralisasi (Website ESP2). Komponen 2, Efisiensi Energi dalam Konstruksi dan Penggunaan Bangunan Besar. Dengan total anggaran 57 juta DKK, komponen 2 akan membahas efisiensi penggunaan energi dengan mempromosikan konservasi energi dalam industri skala menengah dan besar bersama-sama dengan gedung-gedung besar swasta dan publik (Website ESP2). Dengan demikian akan mengurangi beban APBN, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak sektor energi terhadap lingkungan.

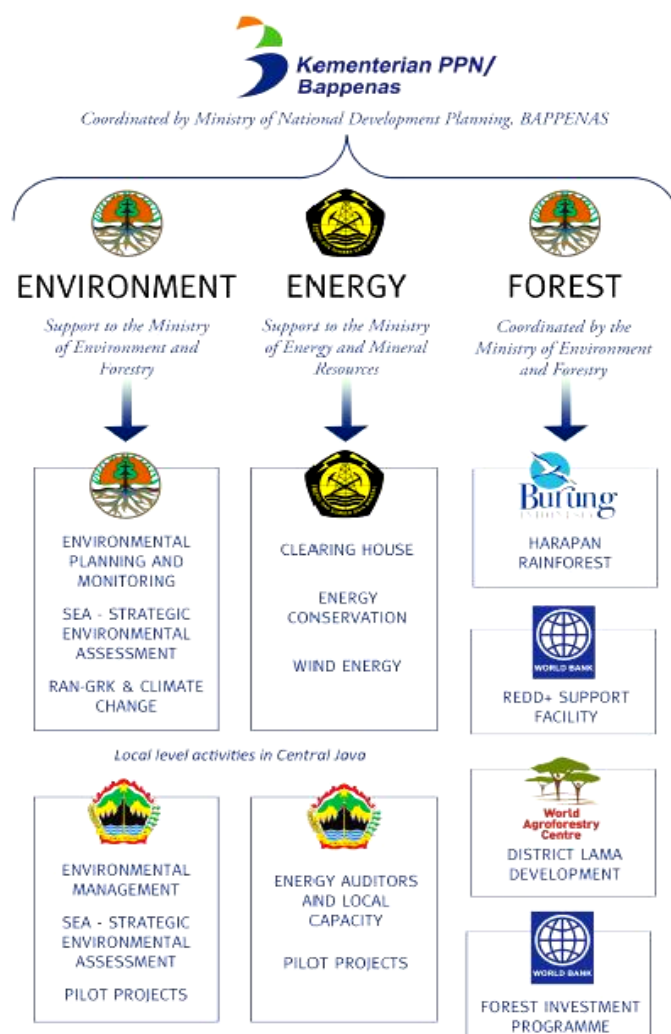
Komponen 3, Dukungan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Terdesentralisasi dan Energi Terbarukan. 90 juta DKK akan dialokasikan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Indonesia untuk mendukung pembangunan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan tata pemerintahan daerah di masyarakat pedesaan di Indonesia. PNPM adalah inisiatif Indonesia yang dikelola oleh Bank Dunia. ESP2 mendukung dana khusus 'hijau' untuk implementasi proyek-proyek pengelolaan energi dan sumber daya alam yang terbarukan. Seperti PNPM lainnya, PNPM Hijau mengalokasikan dana hibah untuk kecamatan di Indonesia, khususnya Sumatra dan Sulawesi, untuk proyek-proyek yang diprioritaskan.

Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3)

ESP3 berlangsung dari tahun 2013 hingga 2018 dengan total anggaran 270 juta DKK (setara dengan 50 juta USD atau 600 miliar Rupiah) sebagai hibah dari pemerintah Denmark (Website ESP3). Melalui kerja sama yang erat dengan lembaga pemerintah pusat ESP3 berupaya memfasilitasi transformasi bertahap menuju ekonomi hijau. Ekonomi yang berkontribusi untuk meminimalkan Perubahan Iklim dan mempersiapkan negara untuk menghadapi konsekuensi pema-nasan global.

ESP3 dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Program ini juga mencakup dukungan untuk empat proyek hutan dan iklim individu yang dilaksanakan oleh Burung Indonesia, *World Agroforestry Center*, dan Bank Dunia (*World Bank*).

Gambar III.1. Cooperation in three sectors



Sumber: Website ESP3

ESP3 terdiri dari 3 komponen yang memfokuskan secara khusus pada tema yang berbeda-beda. Komponen 1 (*Environment*): Peningkatan dampak lokal dari implementasi kebijakan dan pengelolaan lingkungan, juga di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (ESP3 Program Document, 2012). Dukungan ini menargetkan kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan, mempromosikan, dan mengkoordinasikan kepedulian lingkungan di berbagai sektor.

Komponen 2 (*Energy*): Dukungan untuk Penerapan Kebijakan Efisiensi Energi, Konservasi Energi, dan Energi Terbarukan (ESP3 Program Document, 2012). Komponen ini menargetkan manajemen energi dan melakukan banyak tindak lanjut pada kegiatan yang dimulai selama ESP2. Ini termasuk upaya untuk membuat Lembaga Kliring Efisiensi dan Konservasi Energi (EECCH) berkelanjutan, dan membantu dalam membangun Rumah Cleraing gabungan baru dengan Direktorat Energi Baru dan Terbarukan dan Direktorat Bioenergi, dan mendukung kemampuan ESDM untuk

mempromosikan penggunaan energi tradisional dan terbarukan yang lebih efisien.

Komponen 3 (*Forest*): Mitigasi Perubahan Iklim melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk *Community-based National Resources Management* (CBNRM) (ESP3 Program Document, 2012). Dalam Komponen 3 ini menggabungkan lima subproyek berbeda yang semuanya dalam satu atau lain cara terkait dengan pengelolaan sumber daya alam lokal atau *National Resources Management* (NRM) yang lebih baik. Subproyek dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat dan dilaksanakan baik bekerja sama langsung dengan atau di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kehutanan. Komponen 3 mencakup beberapa subproyek berikut: *Danida Support to Harapan Rainforest* dilaksanakan oleh Burung Indonesia, Tindakan Mitigasi yang Sesuai Secara Lokal dilaksanakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Dukungan untuk Program Investasi Hutan Indonesia yang dilaksanakan oleh Bank Dunia (Wulandari, 2019).

Implementasi ESP3

Sesuai dengan komponen 2 yang fokus pada area Energi, ESP3 berusaha mendorong Indonesia agar menggunakan serta menghasilkan energi bersih. Salah satunya adalah dengan melaksanakan 4 proyek energi bersih di Jawa Tengah. 4 proyek percontohan bidang lingkungan dan energi hasil kerja sama Pemerintah Denmark dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kepulauan Karimunjawa, pembangkit listrik tenaga gas metana di TPA Jatibarang Kota Semarang, pembangunan instalasi pengolahan limbah pati onggok di Klaten, serta pembangunan fasilitas *refuse derived fuel* di TPA Tritih Lor, Kabupaten Cilacap (Prov. JaTeng, 2017).

Komponen terakhir atau komponen 3 dari ESP3 fokus pada masalah hutan atau *Forest*. Untuk memenuhi komponen ini, salah satu bentuk dukungan pemerintah Denmark adalah dengan mendukung kegiatan Hutan Harapan yang diimplementasikan oleh Burung Indonesia sebagai pemegang lisensi Restorasi Ekosistem Hutan Harapan. Lebih tepatnya dalam pengelolaan dan pemulihan hutan di Indonesia melalui program restorasi Ekosistem Hutan Harapan yang ada di Jambi dan Sumatera Selatan.

Kepentingan Nasional Denmark

Kepentingan Ideologi, Denmark sudah mulai menyadari bagaimana pentingnya isu lingkungan sejak tahun 1960an dimana muncul semakin banyak keluhan masyarakat terkait pencemaran

lingkungan, seperti kabut asap serta limbah air kotor, dan bagaimana kurangnya komitmen dari pemerintah dalam menangani hal tersebut (COWI Consulting Engineers and Planners AS, 2001:84). Pada tahun 1980an, yang sebelumnya kekhawatiran akan lingkungan hanya bersifat domestik saat itu mulai beralih juga pada skala internasional. Denmark mulai menyadari bahwa untuk menyelesaikan isu lingkungan, terutama pada masa itu adalah polusi, tidaklah dapat diselesaikan sendiri namun negara lain pun harus ikut serta dalam upaya menjaga dan mengurangi dampak buruk kepada lingkungan.

Sesuai dengan konsep kepentingan nasional Neuchterlein, kepentingan ideologi mengacu pada aktivitas negara dalam melindungi dan menjalankan hal-hal yang dipercayai dan dianggap penting oleh masyarakatnya. Neuchterlein juga membagi intensitas kepentingan nasional menjadi 4 tingkatan. Mulai dari *Survival*, *Vital*, *Major* hingga *Peripheral*. Kepentingan Ideologi bagi Denmark disini memiliki intensitas *Major*, karena Denmark baik pemerintah dan masyarakatnya, sangat memegang tinggi kepercayaan akan pentingnya lingkungan. Hal ini didorong oleh luas Negara Denmark yang tidak begitu besar dan fakta bahwa banyak sekali sektor yang menggunakan sumber daya alam sehingga menjadi penting untuk mereka menjaga lingkungan karena itu dapat berdampak langsung untuk stabilitas negaranya.

Selama ratusan tahun, Denmark adalah masyarakat yang berbasis pada pertanian dan perikanan, dan masyarakat Denmark masih merasa sangat terikat erat dengan tanah dan air di sekitar mereka. Rasa hormat terhadap alam inilah mengapa Denmark menjadi pelopor dalam mempromosikan *sustainability* dan *renewable energy*. Bagi Denmark, *sustainability* adalah pendekatan holistik yang mencakup energi terbarukan, pengelolaan air, daur ulang limbah, dan transportasi hijau termasuk budaya bersepeda (Denmark Official Website). Melalui upaya yang luar biasa dan berkelanjutan selama beberapa dekade, Denmark telah membangun sistem energi hijau kelas dunia yang memberikan lebih banyak energi hijau pada kehidupan sehari-hari.

Denmark yang juga merupakan bagian dari negara Annex 1 di Protokol Kyoto mempunyai target untuk menurunkan emisi GRK nya hingga 21% dari presentase tahun 1990, namun dari hasil evaluasi ternyata Denmark baru mampu menurunkan hingga 18,9% yang artinya Denmark masih gagal memenuhi targetnya. Walaupun begitu pencapaian ini tetap terhitung jauh lebih baik dari negara-negara maju lainnya seperti Austria yang mempunyai target -13% namun baru mampu menurunkan 4,8% (Velten et al. 2014)) dan juga

Luxemburg yang mempunyai target -28% dan baru bisa mencapai penurunan 8,1% (Donat et al. 2014).

Denmark ingin menjadi mitra yang kuat dan tepercaya dalam pembangunan internasional. Kebijakan pembangunan Denmark (*development policy*) adalah elemen sentral dalam kebijakan luar negeri Denmark dan karenanya dalam keterlibatan global Denmark. Kebijakan pembangunan Denmark harus berkontribusi pada penciptaan dunia yang bercirikan perdamaian, keamanan, tatanan hukum internasional yang mempromosikan hak asasi manusia, ekonomi dunia yang stabil dan solusi bersama untuk masalah lingkungan, iklim dan kesehatan global. Inilah mengapa Denmark harus sangat terlibat secara internasional.

Pada tahun 2015, PBB mengadopsi agenda baru yang mencakup beberapa hal diantaranya pengurangan kemiskinan, pendidikan, gender, kesehatan, dan perang melawan perubahan iklim. Agenda ini disebut juga dengan Agenda 2030 yang didalamnya terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terkait agenda tersebut, PBB menegaskan kembali komitmen *Official Development Assistance* (ODA) yang sudah ada dimana negara-negara maju harus menyediakan setidaknya 0,7% dari pendapatan nasional bruto (GNI) untuk negara berkembang dan 0,15-0,20% dari GNI untuk negara kurang berkembang/*Less Developed Countries* (LDCs) (UNODA website). Denmark menjadi salah satu dari hanya 5 negara di dunia yang saat ini memenuhi komitmen tersebut.

Sejalan dengan teori Neorealisme dimana perilaku negara ditentukan oleh keadaan dunia internasional dan fakta bahwa perubahan iklim ini merupakan dampak dari aktivitas dunia internasional, Denmark merasa perlu untuk mengajak negara lain agar mengikuti langkahnya dalam mengutamakan prinsip peduli lingkungan dalam upaya menanggulangi perubahan iklim. Denmark memiliki reputasi internasional karena memiliki kebijakan, perencanaan, dan kerangka peraturan yang kondusif, yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan (*sustainable growth*), lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini menjadi faktor besar mengapa Denmark banyak melakukan kerjasama ataupun memberikan bantuan dalam bidang-bidang terkait diatas bagi negara lain khususnya negara-negara berkembang.

Kepentingan Ekonomi, sejak 2009 ekspor Indonesia ke Denmark tumbuh tujuh persen per tahun, dan ekspor Denmark ke Indonesia meningkat lebih tinggi lagi, dengan laju pertumbuhan 18 persen per tahun (Pedersen, 2015). Indonesia diharapkan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia sebelum tahun 2030, atau terbesar ke-4 jika mempertimbangkan

keseimbangan daya beli. Dengan sekitar 260 juta penduduk, kelas menengah yang diperkirakan akan meningkat menjadi 141 juta sebelum tahun 2020 dan berdasarkan pernyataan yang tertera dalam *website* resmi kementerian luar negeri Denmark di Indonesia bahwa tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan sekitar 5-6 persen selama sepuluh tahun terakhir hingga 2018, Indonesia merupakan potensi yang sangat besar bagi perusahaan Denmark (Danish Embassy Website).

Dengan mengaplikasikan konsep kepentingan nasional Neuchterlein, kepentingan ekonomi dalam studi kasus ini termasuk kedalam kepentingan dengan intensitas *Major*. Karena ekonomi menjadi hal yang penting bagi Denmark dalam melaksanakan kerjasama dengan negara lain namun dalam hal ini tidak cukup untuk dikatakan sebagai isu yang vital sehingga menyangkut keberadaan negara itu sendiri.

ASEAN, dengan Indonesia sebagai pemain terbesar, terus berkembang dan membaik serta terjalannya kerja sama yang semakin erat antar negara anggotanya telah dan akan terus memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian kawasan. Ekonomi yang terus tumbuh dan kekayaan yang lebih besar di antara konsumen dikombinasikan dengan rencana pembangunan 20 tahun oleh Pemerintah, mulai dari 2005 hingga 2025, yang menargetkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, investasi bisnis, energi, ketahanan pangan, dan budaya dan inovasi teknologi, menunjukkan bahwa permintaan akan produk dan solusi baru dan lebih baik sangat besar. Selain itu, terdapat permintaan yang terus meningkat akan solusi cerdas, efisien, dan berkelanjutan untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk saat ini dan juga untuk generasi mendatang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs web *World Integrated Trade Solutions* (WITS) mengenai ekspor Denmark ke Indonesia dari tahun 2013-2018, Produk Mesin dan Elektronik selalu menjadi contributor terbanyak. Tertulis bahwa pada tahun 2013 ekspor peralatan mesin dan elektronik Denmark ke Indonesia sebesar 50.088 juta USD kemudian pada tahun 2014 mengalami sedikit perubahan menjadi 50.644 juta USD (WITS, 2017). Pada tahun 2015 sebesar 67.644 juta USD, 2016 sebesar 41.545 juta USD, 2017 sebesar 102.249 juta USD dan 2018 sebesar 54.634 juta USD.

Upaya Denmark dan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebenarnya masih terbilang cukup sulit karena penggunaan batu bara di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah Adhityani Putri yang mengatakan Indonesia bergantung pada batu bara dalam sejumlah sektor. Misalnya, proyek PLTU 12 Gigawatt. Dimana selain hal itu, Indonesia juga

merupakan negara produsen batu bara sehingga banyak kepentingan bisnis dan politik dalam industry ini (CNN, 2021).

Namun maka dari itu, Denmark tetap gencar melakukan banyak kerjasama dengan Indonesia dalam bidang lingkungan mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki peran besar di ASEAN. Sehingga dengan menjalin hubungan baik dengan Indonesia, Denmark berharap Indonesia akan mampu meng-*influence* negara anggota ASEAN lainnya untuk ikut serta membangun hubungan baik dengan Denmark. Hal ini kemudian diharapkan akan mampu membuka pintu bagi Denmark untuk menjadi *role model* dan juga membuka pintu untuk perluasan pasar alat pembuat energy terbarukan di ASEAN.

Kepentingan Tata Internasional, baik dalam pandangan Neorealisme dan juga konsep kepentingan nasional Nuechterlin, Tata-tatanan dunia internasional menjadi poin yang sangat penting bagi sebuah negara. Dalam pandangan neorealisme dunia internasional adalah anarki, dimana semua negara memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang memegang kuasa lebih tinggi. Namun tidak dapat dibohongi bahwa tiap-tiap negara mempunyai kemampuan dan kelebihan dalam bidang yang berbeda-beda. Sehingga memungkinkan bagi suatu negara untuk lebih unggul dalam beberapa aspek tertentu.

Dalam menganalisa kepentingan nasional Nuechterlin menggaris bawahi pentingnya menentukan seakurat mungkin intensitas perasaan atau ketertarikan yang dimiliki oleh suatu negara terhadap isu-isu internasional tertentu. Kepentingan tata internasional ini juga termasuk kedalam *Major issues* bagi Denmark.

Tatanan internasional menjadi sangat penting dalam era yang sangat global ini. Negara yang pada awalnya dianggap sebagai satu-satunya aktor dalam hubungan internasional kini sudah tergeser kedudukannya. Saat ini banyak aktor yang tidak memiliki dasar konsep kedaulatan tetapi tetap mampu mempengaruhi agen utama dalam sistem internasional. Banyak organisasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank). Keterlibatan mereka, bagaimanapun, mempengaruhi negara-negara karena kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional tersebut akan diterapkan di setiap negara anggota.

Sesuai dengan salah satu struktur politik yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam Neorealisme yaitu *The distribution of capabilities* dimana satu negara dengan negara lainnya akan dibedakan dari kemampuan dan tanggung jawabnya. Hal ini diterapkan oleh PBB dalam Protokol Kyoto yang hanya mengikat dan menempatkan beban yang lebih berat pada negara-

negara maju, di bawah prinsip "tanggung jawab bersama yang dibedakan berdasarkan kemampuan masing-masing", karena PBB mengakui bahwa negara-negara industri dan EIT sebagian besar bertanggung jawab atas tingginya tingkat GRK di atmosfer saat ini.

Mengapa tata internasional ini menjadi penting bagi Denmark? Karena Denmark merupakan salah satu negara yang terikat dalam Protokol Kyoto yang dikarenakan hal tersebut Denmark harus mampu memenuhi target yang sudah ditentukan. Berdasarkan Protokol Kyoto target penurunan emisi Denmark untuk periode 2008-2012 adalah minus 21% dari presentase tahun 1990 untuk CO₂, CH₄ dan N₂O dan tahun 1995 untuk F-gas. Evaluasi kumpulan data GRK yang diperoleh dari *Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country Report: Denmark* (Eberle et al. 2014) menunjukkan bahwa emisi Denmark baru menurun rata-rata sebesar 18,9% dibandingkan dengan tahun dasar yang ditetapkan Kyoto yang berarti Denmark belum mampu mencapai target 21%. Oleh karena itu tidak dapat dipastikan apakah Denmark akan mampu memenuhi komitmennya melalui pengurangan domestik saja.

Saat upaya domestik dianggap tidak dapat memenuhi target tentu upaya pengurangan yang harus dilakukan selanjutnya adalah upaya internasional yang tentu melibatkan negara lain. Denmark yang merupakan negara industri yang maju, maka ia punya tanggung jawab lebih besar dalam mengurangi emisi GRK. Sehingga hampir tidak mungkin untuk Denmark melakukan upaya pengurangan emisi GRK dengan sesama negara maju yang notabene nya sudah memiliki target pengurangan emisi yang cukup tinggi.

Negara-negara berkembanglah kemudian yang menjadi target Denmark untuk melakukan kerjasama. Faktanya, negara-negara berkembang seringkali mempunyai wilayah lebih besar dibanding Denmark namun kemampuan masyarakat serta pemerintah nya masih dapat dikatakan belum sebaik Denmark. Hal ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan ESP yang semuanya dilakukan dengan negara-negara berkembang (mengacu pada bahasan bab sebelumnya) seperti Bhutan, Zambia, Kenya, Mozambique dan Indonesia.

Sebagai negara pertama yang menerapkan hukum lingkungan pada tahun 1973 Denmark tidak pernah berhenti berupaya hingga saat ini. Selain menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di tahun 2009 silam, sekarang Denmark berada di garis depan negara-negara Eropa untuk konservasi keanekaragaman hayati. Denmark juga mengakui bahwa salah satu solusi untuk menghadapi tantangan iklim adalah dengan melakukan kerjasama antar negara. Secara

tidak langsung, dengan melakukan kerjasama lingkungan dengan negara lain, Denmark sedang berupaya untuk memenuhi kepentingan tata internasionalnya yang dalam hal ini adalah memenuhi target pengurangan emisi GRK dibawah Protokol Kyoto. Dengan begitu, citra Denmark yang selalu menjunjung tinggi betapa pentingnya isu lingkungan pun akan tetap terjaga.

PENUTUP

Sebuah bantuan ataupun kerjasama, terlebih yang sifatnya internasional pasti terjadi karena dilatar belakangi alasan tertentu. Begitu juga dengan pemberian bantuan lingkungan oleh Denmark kepada Indonesia melalui *Environmental Support Programme* (ESP). Denmark pasti memiliki kepentingan nasional yang ingin mereka capai dengan memberikan bantuan tersebut. Dari penelitian ini diketahui bahwa ada 3 kepentingan nasional yang dikejar oleh Denmark.

Pertama, Kepentingan Ideologi. Seperti apa yang dituliskan oleh Nuechterlin, salah satu kepentingan nasional adalah ideology. Selama ratusan tahun, Denmark adalah bangsa yang berbasis pada pertanian dan perikanan, dan masyarakat Denmark masih merasa sangat terikat erat dengan tanah dan air di sekitar mereka. Selain itu, Denmark termasuk salah satu negara yang sedari dulu menyadari bagaimana pentingnya isu lingkungan ini sehingga ideologi untuk melindungi dan menjaga bumi sudah tertanam pada masyarakatnya. Rasa hormat terhadap alam inilah mengapa Denmark menjadi pelopor dalam mempromosikan *sustainability* dan *renewable energy*.

Kedua, Kepentingan Ekonomi. Dengan membangun hubungan kerjasama dengan negara lain, citra Denmark dalam dunia internasional tentu akan semakin baik. Masih menggunakan konsep kepentingan nasional dari Nuechterlin, sebagai salah satu negara unggul pengekspor obat-obatan, alat pembangkit listrik dan turbin angin tentu kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Denmark memperluas pasar ekonominya. Disamping itu bekerjasama dengan Indonesia akan memperbesar peluang Denmark untuk mampu memasuki pasar negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia dijadikan contoh oleh Denmark bahwa program yang mereka laksanakan berhasil dan dapat memberikan manfaat baik bagi negara-negara berkembang lainnya.

Ketiga, Kepentingan Tatanan Internasional. Baik dalam pandangan Neorealisme dan juga konsep kepentingan nasional Nuechterlin, Tatanan dunia internasional menjadi poin yang sangat penting bagi sebuah negara. Pada era global ini Negara yang awalnya dianggap sebagai satu-satunya aktor dalam hubungan Internasional kini sudah tergeser

kedudukannya dengan adanya organisasi-organisasi internasional yang terlibat dalam pengambilan keputusan seperti PBB, IMF dan Bank Dunia. Kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini akan diterapkan pada setiap negara anggotanya.

Denmark sebagai negara industry maju memiliki tanggung jawab lebih atas tingginya GRK di atmosfer saat ini. Sebagai salah satu negara yang terikat dalam Protokol Kyoto Denmark harus mampu memenuhi target pengurangan emisi GRK yang sudah ditentukan PBB. Sedangkan dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa emisi Denmark baru menurun rata-rata sebesar 18,9% dibandingkan dengan tahun dasar yang ditetapkan Kyoto yang berarti Denmark belum mampu mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu untuk mempertahankan posisi dan citra baik negaranya dalam dunia internasional, Denmark harus melakukan upaya yang salah satunya adalah melakukan pemberian bantuan lingkungan pada negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- COWI Consulting Engineers and Planners AS, *Environmental Factors and Health: The Danish Experience*, (Copenhagen: Danish Environmental Protection Agency), 2001; tersedia di: <https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2001/87-7944-519-5/pdf/87-7944-518-7.pdf>, diakses pada 20 september 2020.
- DANIDA. *Project : Environmental Sector Programme Support* [Website Resmi];tersedia di: <https://openaid.um.dk/en/projects/DK-1-121817>, diunduh pada: 6 Januari 2020.
- DANIDA. *Project: Environmental Support Programme Phase 2(ESP2)* [Website resmi]; tersedia di: <https://openaid.um.dk/en/projects/DK-1-148139>, diunduh pada: 6 Januari 2020.
- DANIDA. *Project: Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3)* [Website Resmi];tersedia di: <https://openaid.um.dk/projects/dk-1-204597>, diunduh pada: 6 Januari 2020.
- Danish Embassy in Indonesia. *Market and Business Culture in Indonesia* [website resmi], tersedia di: <https://indonesien.um.dk/en/the-trade-council/market-and-business-culture-in-indonesia/>, diakses pada: 3 Februari 2020.
- Denmark Official Website, *Sustainability in Denmark*, tersedia di: <https://denmark.dk/innovation-and-design/sustainability>, diakses pada 13 Agustus 2020.
- Denmark.dk, *Pioneers in Clean Energy* [Website Resmi]; tersedia di: <https://denmark.dk/innovation-and->

- design/clean-energy, diunduh pada: 2 Januari 2020.
- Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim. *Statistik tahun 2018 Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim* [website resmi]; tersedia di: http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/statistik_PPI_2018_opt.pdf, diakses pada: 2 Januari 2020.
- Donat, Lena. Dkk. 2014. *Assesment of Climate Change Policies in the Context of the European Semester Country Report: Luxemburg*, (Jerman: Ecologic Institute), tersedia di: https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2014/countryreport_lu_ecologicelareon_jan2014_0.pdf, diakses pada: 13 Oktober 2021
- Environmental Support Programme 2 (ESP2). *About ESP* ; tersedia di: <https://web.archive.org/web/20130707024641/http://www.esp2indonesia.org/content/about-esp>
- Environmental Support Programme, 3rd Phase (2013-2017): Programme Document
- ESP3. 2015. *About ESP3*, tersedia di: <https://web.archive.org/web/20151017082235/http://www.esp3.org/index.php/en>
- Humas Ebtke. 2019. *Pltb Tolo Sukses Beroperasi Komersial, Tahap II Siap Dikembangkan*. tersedia di: <http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/09/09/2330/pltb.tolo.sukses.beroperasi.komersial.tahap.ii.siap.dikembangkan>
- KBRICPH, *Joint Declaration Between The Minister For Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia And The Minister For Foreign Affairs Of The Kingdom Of Denmark On " An Innovative Partnership For The 21st Century"* [dokumen resmi], tersedia di: <https://www.kbricph.dk/images/DKdekmit.pdf>
- KBRICPH. *Perdagangan Bilateral* [website resmi]; tersedia di: <https://www.kbricph.dk/index.php/sekilas-info/perdagangan-bilateral>
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 2016. *Strategic Energy Sector Cooperation Between Indonesia & Denmark: Annual Report*; tersedia di: https://um.dk/~media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Samarbejde/Ministerier/SSC/AArs_rapporter%202016/Indonesien%20energi.pdf?la=da
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 2016. "Evaluation of DANIDA Energy and Environment Cooperation in South East Asia". *Evaluation Report* November [laporan evaluasi]; tersedia di: http://www.netpublikationer.dk/UM/evaluation_eec_southeast_asia/html/helepubl.html, diunduh pada: 2 Januari 2020.
- Nuechterlein, Donald E.. 1979. "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". *British Journal of International Studies*.
- Ocean Conference. "Reducing Plastic Marine Debris in Indonesia", United Nations [website resmi]; tersedia di: <https://oceanconference.un.org/commitments/?id=20500>
- Pashakhanlou, Arash Heydarian. 2009. *Comparing and Contrasting Classical Realism and Neorealism*. United Kingdom: Aberystwyth University.
- Pedersen, Alexandra. 2015. "From Aid to Trade: Denmark Cashing in on Changing Fortunes in Southeast Asia". *CPH Post*, 8 September; tersedia di: <https://cphpost.dk/?p=27137>, diakses pada: 3 Maret 2021.
- Portal Berita Prov. Jawa Tengah, *JaTeng-Denmark Realisasikan 4 Proyek Percontohan*, tersedia di: <https://jatengprov.go.id/publik/jateng-denmark-realisasikan-4-proyek-percontohan/>
- Pushkin, Adam ,dkk., 2016. "Indonesia's Partnerships with Denmark & the United Kingdom", *Indonesia Investments*, 14 April [berita online]; tersedia di: <https://www.indonesia-investments.com/id/news/news-columns/indonesia-s-partnerships-with-denmark-the-united-kingdom/item6715>
- Robert, Jackson and Sorensen Georg. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saturi, Sapariah dan Indra Nugraha. 2015. "Indonesia Targetkan Penurunan Emisi Karbon 29% pada 2030" *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 2 September [Berita Online], tersedia di: <https://www.mongabay.co.id/2015/09/02/indonesia-targetkan-penurunan-emisi-karbon-29-pada-2030/>, diunduh pada 2 Januari 2020.
- United Nations, *Official Development Assistance*, tersedia di: <https://developmentfinance.un.org/official-development-assistance>, diakses pada: 4 Oktober 2020.
- Velten, Eike Karola, dkk. 2014. *Assesment of Climate Change Policies in the Context of the European Semester Country Report: Austria*, (Jerman: Ecologic Institute), tersedia di: <https://www.ecologic.eu/sites/default/files>

/publication/2014/countryreport_at_ecolog
iceclareon_jan2014_0.pdf, diakses pada: 13
Oktober 2021.

Waltz, Kenneth. 1979. *Theories of International
Politics*. Illinois: Waveland Press, Inc.

Wulandari, Sri. 2019. "Implementasi Environmental
Support Programme Phase III (ESP3)
Denmark di Hutan Harapan (Jambi dan
Sumatera Selatan) Indonesia Tahun 2013-
2018". *JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari -Juni*;
tersediadi: [https://jom.unri.ac.id/
index.php/JOMFSIP/article/view/23879/23
111](https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23879/23111)

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta:
Kencana.